

HUKUM PAJAK MATERIAL 2

Seri Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Wirawan B. Ilyas
Rudy Suhartono



Penerbit
Salemba Humanika



Sebagai sumber pendapatan negara yang strategis, pajak berkontribusi dalam kehidupan bernegara berupa pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk pembangunan di pusat kota dan daerah-daerah terpencil. Pembangunan di bidang ekonomi pun tidak terlepas dari berbagai kebijakan perpajakan, baik di pusat maupun di daerah, sehingga para pelaku bisnis mengharapkan kebijakan yang kondusif dengan dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu penunjang dalam memperluas pengetahuan dan mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami peranan pajak bagi pembangunan.

Buku **Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** ini memberikan penjelasan secara sistematis dan runtun sesuai topik, pasal, serta peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang perpajakan. Selain itu, buku ini juga menyajikan ketentuan perpajakan yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), yaitu transaksi terutang (PPN), kegiatan membangun sendiri serta penjualan aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, transaksi terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), mekanisme pengkreditan yang dianut dalam menghitung PPN, fasilitas perpajakan yang terdapat dalam UU PPN, serta kewajiban dan hak Pengusaha Kena Pajak dalam sistem pemungutan PPN. Sebagai tambahan, setiap bab dalam buku dilengkapi dengan kutipan pasal dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan materi beserta penjelasannya, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.



**Penerbit
Salemba Humanika**

ISBN: 978-602-8555-49-4



9 786028 555494

Daftar Isi

Tentang Penulis	iii
Kata Sambutan	v
Pendahuluan.....	vii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Pengertian Pajak	1
Pajak di Dalam Sistemika Tata Hukum	3
Bab 2 Sekilas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan	
Pajak Penjualan atas Barang Mewah	5
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	5
Karakteristik Pajak Penjualan atas Barang Mewah	6
Sistemika Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.....	7
Gambaran Pemungutan PPN menurut UU PPN	10
Gambaran Pemungutan PPnBM menurut UU PPN	13
Bab 3 Transaksi Terutang Pajak Pertambahan Nilai	17
Dasar Hukum.....	17
Kedudukan dalam UU PPN.....	17
Transaksi yang Terutang PPN.....	17
Bab 4 Transaksi Terutang PPN atas Impor	
Barang Kena Pajak Berwujud	25
Dasar Hukum	25
Impor BKP Berwujud	25
Impor BKP Dibebaskan PPN	27
Saat Terutang dan Bukti Pembayaran	30
Sebagai Pajak Masukan atau Harga Beli.....	31

Bab 5	Transaksi Terutang PPN atas Pemanfaatan	
	Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud	35
	Dasar Hukum	35
	Pengertian Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP	36
	BKP Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak.....	37
	Saat Terutang, Pembayaran, dan Pelaporan	39
	Besarnya PPN Terutang	40
	Sebagai Pajak Masukan atau Biaya	41
Bab 6	Transaksi Terutang PPN atas Ekspor BKP Berwujud	43
	Dasar Hukum	43
	Pengertian Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud	43
	Saat Terutangnya PPN	45
	Besarnya PPN Terutang	45
	Ekspor BKP Berwujud oleh PKP atau Non-PKP	46
	Bukti Ekspor BKP Berwujud.....	47
	Kelebihan Pembayaran PPN	48
Bab 7	Transaksi Terutang PPN	
	atas Ekspor BKP Tidak Berwujud atau JKP	51
	Dasar Hukum	51
	Ekspor BKP Tidak Berwujud atau JKP.....	51
	Saat Terutangnya PPN	54
	Besarnya PPN Terutang	54
	Ekspor oleh PKP atau Non-PKP.....	55
	Bukti Ekspor BKP Tidak Berwujud atau JKP	56
	Kelebihan Pembayaran PPN	57
Bab 8	Transaksi Terutang PPN Penyerahan BKP/JKP oleh	
	Pengusaha di Dalam Negeri	59
	Dasar Hukum	59
	Pengertian BKP/JKP.....	60
	Pengertian Penyerahan BKP/JKP	61
	Pengertian Daerah Pabean	65
	Pengertian Pengusaha	66
	Saat Terutang PPN.....	68
	Saat Pembuatan Faktur Pajak.....	69
	Tempat Terutangnya PPN	69
	Besarnya PPN Terutang	70
	Besarnya PPN Disetor	73

	Kewajiban Pengusaha.....	74
	PPN Terutang Dipungut Pengusaha	76
	PPN Terutang Dipungut Pemungut.....	77
	PPN Terutang Dibebaskan	78
	PPN Terutang Tidak Dipungut.....	79
Bab 9	PPN Terutang: Kegiatan Membangun Sendiri	81
	Dasar Hukum.....	81
	Definisi Kegiatan Membangun Sendiri	82
	PPN yang Terutang.....	82
	Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan.....	83
	Pihak yang Bertanggung Jawab	83
Bab 10	PPN Terutang: Penjualan Aktiva Tetap	85
	Dasar Hukum	85
	Saat Terutang.....	86
	Bukti Pemungutan PPN.....	87
	Saat Pembuatan Faktur Pajak.....	87
Bab 11	Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak:	
	Kedudukannya dalam Pemungutan PPN.....	89
	Dasar Hukum	89
	Kedudukan dalam UU PPN.....	89
	Barang Kena Pajak.....	90
	Jasa Kena Pajak	93
	Penegasan Lebih Lanjut BKP dan JKP.....	96
Bab 12	Transaksi Terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.....	105
	Kedudukan dalam UU PPN.....	105
	Transaksi yang Terutang PPnBM	105
	Besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah.....	106
	Kelompok dan Jenis BKP Tergolong Barang Mewah.....	106
	BKP Barang Mewah Tidak Terutang PPnBM.....	106
	Pembebasan PPnBM.....	107
	Kelompok Kendaraan Bermotor yang Termasuk	
	Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Adalah:	
	(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006).....	108
	Kelompok BKP Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor	
	Adalah: (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004)	110
	Jenis Harta yang Tergolong Mewah	112



Bab 13	Saat, Tempat Terutang, dan Faktur Pajak	115
	Kedudukan dalam UU PPN.....	115
	Saat Terutangnya PPN	116
	Tempat Terutangnya PPN	117
	Transaksi Terutang PPN yang Wajib Dibuat Faktur Pajak.....	119
	Saat Pembuatan Faktur Pajak.....	120
	Bentuk dan Syarat Pembuatan Faktur Pajak	120
	Faktur Pajak PKP Penjual.....	123
	Faktur Pajak PKP Pembeli.....	124
	Larangan Membuat Faktur Pajak	124
	Sanksi Terkait Faktur Pajak	124
	Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak	125
Bab 14	Pengembalian dan Pembatalan BKP/JKP.....	129
	Kedudukan dalam UU PPN.....	129
	Dasar Hukum.....	129
	Nota Retur BKP dan Nota Pembatalan JKP.....	130
Bab 15	Syarat dan Besarnya Pengkreditan Pajak Masukan	133
	Kedudukan dalam UU PPN.....	133
	Waktu Pengkreditan PPN.....	133
	Bukti Pengkreditan Pajak Masukan	134
	Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	135
	Besarnya Pengkreditan Pajak Masukan	136
Bab 16	PPN Terutang atas Emas Perhiasan, Kendaraan Bermotor, Rokok, Rekaman Suara, Film Cerita, Leasing, Omzet di Bawah Omzet Tertentu	143
	Emas Perhiasan dan Kendaraan Bermotor Bekas	143
	Rokok	144
	Rekaman Suara	146
	Film Cerita (Rekaman Gambar)	147
	Leasing dan Sale Leaseback.....	150
	Omzet di Bawah Omzet Tertentu.....	151
Bab 17	Penyerahan kepada Pemungut PPN	153
	Dasar Hukum.....	153
	Bendaharawan sebagai Pemungut PPN.....	154
	Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Sumber Panas Bumi.....	157

Bab 18	Penyerahan/Impor Tidak Dipungut PPN.....	161
	Dasar Hukum	161
	Kawasan Bebas (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).....	161
	PPN dan PPnBM di Pulau Batam	163
	KAPET	164
	Tempat Penimbunan Berikat	165
Bab 19	Penyerahan Terutang PPN, namun Dibebaskan Pemungutan PPN	169
	Kedudukan dalam UU PPN	169
	Dasar Hukum	169
	Impor Dibebaskan PPN.....	170
	Penyerahan yang Dibebaskan PPN	173
Bab 20	Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran PPN & PPnBM.....	177
	Kedudukan dalam UU PPN	177
	PPN Kurang Dibayar.....	177
	Kelebihan Pembayaran PPN	178
	Tata Cara Restitusi PPN	179
	Restitusi PPnBM	182
	Lampiran	L-1
	Daftar Pustaka	D-1
	Indeks	I-1